

Volume: 7 Nomor 2 Tahun 2020
[Pp 30-47]

GERAKAN *WOMEN'S MARCH* DAN KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA; REALITY OR CLAIM?

Zaky Ismail

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: zakyismail@uinsby.ac.id

Muhammad Zulfadilah

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: fadhiil1297@gmail.com

Ismail

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: ismail789@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to discuss the effect of Women's March on gender equality policies in Indonesia in 2017-2018. This article used descriptive-qualitative method and used interview techniques and literature study that are relevant to this research. After conducting research, it can be seen that Women's March is an effort that initiated in Washington D.C. This communal movement not only arose in Washington D.C. then furthermore ensued in numerous countries. In Indonesia, Women's March occurred in 2017-2018. In this research, it shows that through the Women's March involvement by leading protests, lobbying, and numerous other follow-up actions are intelligent to effect the policy of gender equality in Indonesia during 2017-2018.

Keywords: *Transnational movement, Women's March, gender equality, policy*

PENDAHULUAN

Gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender seringkali muncul akibat dari keperihatinan dan respon akan adanya sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap orang lain berdasarkan gender, orientasi seksual dan lain-lain. Perbedaan perlakuan tersebut bisa saja dilakukan oleh individu, komunitas (masyarakat), institusi, bahkan negara dan aktor non negara. Respon yang ditunjukkan pun bisa sangat beragam, mulai dari gerakan jalanan (demonstrasi), melakukan advokasi, ataupun berdiri sebagai kelompok penekan (*pressure group*) yang bisa mempengaruhi kebijakan negara. Gerakan-gerakan tersebut sesungguhnya sangat beragam dan tersebar di seluruh dunia, ada yang bersifat lokal, nasional, regional dan transnasional.

Salah satu gerakan yang menjadi wadah perjuangan kesetaraan gender dan penentang diskriminasi yang baru-baru ini muncul sebagai respon terhadap kebijakan dan sikap kepemimpinan adalah gerakan yang mula-mula muncul di Amerika Serikat pada tahun 2017. Gerakan ini kemudian dikenal dengan Women March (WM). WM pada awalnya hanyalah sebuah gerakan demonstrasi dan protes yang dipelopori oleh sejumlah pejuang gender di Washington D.C. di bulan Januari 2017 sebagai respon terhadap Donald Trump¹.

Munculnya gelombang aksi bermula hanya dari sebuah akun media sosial (facebook) milik seorang perempuan asal Hawaii Amerika Serikat yang kemudian mengajak 40 temannya untuk melakukan demonstrasi. Ajakannya tersebut ternyata mendapatkan respon yang sangat luar biasa. Bahkan kemudian muncul banyak akun facebook lainnya yang mendukung dan menyatakan kesediaannya untuk ikut dalam aksi tersebut. Hasilnya sungguh di luar dugaan di mana ribuan perempuan Amerika ikut melakukan penandatanganan petisi dan ikut serta dalam demonstrasi tersebut.² Hebatnya hal ini juga mendapatkan dukungan dari beberapa selebriti papan atas Amerika³.

Aksi yang mereka lakukan pada mulanya hanya sebagai respon terhadap munculnya Donald Trump yang dikenal kontroversial. Mereka ingin menyampaikan pesan bahwa perempuan mempunyai hak yang pantas mereka dapatkan karena telah termaktub dalam hak asasi manusia. Namun demikian, terdapat perkembangan isu, yang tadinya hanya bicara soal hak-hak perempuan, turut pula diangkat masalah kesetaraan gender dan ras, perlindungan minoritas (baik imigran, komunitas Lesbian Gay Biseksual dan transgender (LGBT), layanan kesehatan dan lain sebagainya.

Sebagai bagian dari kelompok penekan (*pressure group*) maka pada perkembangan selanjutnya WM dapat dikelompokkan ke dalam gerakan sosial (*social movement*). Menytir pendapat Giddens,

¹ Nurma Afrinda Prandansari, “*Women’s March, Gerakan Masif Perempuan Menentang Diskriminasi*”, di [https://gelorasriwijaya.co/blog/womens ...](https://gelorasriwijaya.co/blog/womens...), diakses pada 29 April 2018.

² Ibid

³ Eva Mazrieva, “*Protes ‘Women’s March’ di Washington Guncang Dunia*”, <https://www.voaindonesia.com/>Diakses pada 29 April 2018,

Suharko (2006) menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan sebuah upaya bersama yang bertujuan memperoleh kepentingan bersama, di luar institusi yang *established*.⁴ Gerakan juga muncul karena ada nilai yang diperjuangkan. Nilai itulah yang menyebabkan gerakan (sosial) tersebut muncul⁵ Oleh karenanya, WM bisa dikategori sebagai gerakan sosial yang memperjuangkan tujuan bersama dan muncul dari ideologi yang sama dan dilakukan secara bersama-sama.

Dalam konteks inilah WM muncul sebagai gerakan yang memperjuangkan kepentingan bersama yang dipicu oleh ujaran dan pernyataan seorang pemimpin negara. Sebagai bagian dari kelompok warga negara, mereka merasa dipojokkan oleh komentar miring Donald Trump. Sehingga muncul solidaritas bersama untuk melakukan perlawanan. WM juga setidaknya dipicu oleh perasaan tidak puas secara kolektif dari masyarakat karena kondisi yang ada seperti budaya patriarki dan maraknya persoalan sosial berbasis gender⁶.

Pembelaan terhadap nilai-nilai (ideologi) yang sama itulah yang kemudian secara cepat dan massif merambah ke wilayah lain di Amerika new York, Chicago dan lain-lain, bahkan secara transnasional berkembang ke benua-benua lainnya, melintasi batas-batas negara⁷, termasuk ke Indonesia.

Di Indonesia, aksi yang mengatasnamakan WM (chapter Indonesia) pada awalnya dilakukan di Jakarta, 4 Maret 2017. Aksi yang terjadi di depan Istana Negara,⁸ dengan diikuti tidak kurang dari 700 peserta aksi. Setidaknya ada delapan tuntutan yang disampaikan, yaitu,

“(1) Menuntut Indonesia kembali menonjolkan budaya toleransi dan keberagaman; (2) Pemerintah menciptakan infrastruktur hukum yang berkeadilan gender; (3) Pemerintah dan masyarakat memenuhi hak kesehatan bagi perempuan dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; (4) Pemerintah dan masyarakat melindungi lingkungan hidup dan pekerjaan bagi perempuan; (5) membangun kebijakan publik yang pro-perempuan dan pro-kelompok marginal lainnya, termasuk perempuan penyandang difabel; (6) pemerintah dan partai politik meningkatkan kuota keterwakilan dan keterlibatan pihak perempuan di bidang politik; (7) pemerintah dan masyarakat menghormati dan menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT; (8) pemerintah dan masyarakat lebih memperhatikan isu global yang berdampak pada kaum perempuan, serta membangun solidaritas dengan perempuan di seluruh dunia”⁹.

⁴ Suharko, “Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 10, No. 1, Juli 2006, hlm. 1-34

⁵ Denny JA dalam “A Nugraha, *Gerakan Sosial*”, silahkan retrieve http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14715/2/T1_352011603_BAB%20II.pdf, diakses pada 26 Maret 2019,

⁶ Ibid

⁷ Nurma Afrinda Prandansari, “*Women’s March, Gerakan Masif Perempuan Menentang Diskriminasi*”, diakses pada 29 April 2018, <https://gelorasriwijaya.co/blog/womens-march-gerakan-masif-perempuan-menentang-diskriminasi/#>.

⁸ Rahma Wulandari, “*Perjalanan Munira Ahmed, Dari Women’s March Hingga Perlawanan Terhadap Politik Identitas*”, <https://www.femina.co.id/> diakses pada 10 Mei 2018.

⁹ Nurma, Women March...ibid

Masuknya infiltrasi WM Washington ke Indonesia bukan tanpa sebab. Momen berharga tersebut memberi ruang bagi munculnya solidaritas kelompok bagi para pejuang kesetaraan gender. Di lain pihak, kondisi Indonesia yang dianggap masih jauh dari ideal dalam konteks keadilan gender turut melatarbelakanginya. Merujuk pada tulisan Theresia Mutiara Galistya (2019) yang mengutip sebuah laporan tertulis hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, misalnya disebutkan, tercatat satu dari tiga perempuan di Indonesia, berusia antara 15 sampai 64 tahun dilaporkan pernah mendapatkan perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik ataupun seksual¹⁰.

Para aktivis tersebut juga mengacu pada laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan bahwa di 2016 terjadi lebih dari 321.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan di Indonesia. Data ini juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun¹¹. Dari data tersebut, dinyatakan bahwa persoalan mendasar yang sangat urgen untuk diperjuangkan adalah adanya instrumen hukum yang harus berpihak pada perempuan¹². Instrumen hukum harus menjadi perhatian serius pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab melakukan fungsi legislasi dan pengawasan.

Masalah lain yang cukup mengemuka adalah soal perbedaan upah buruh berdasarkan kualifikasi gender. Eksploitasi dan kekerasan yang dilakukan perusahaan terhadap buruh perempuan masih sangat banyak terjadi. Padahal instrumen hukum yang mengatur itu juga tidak bisa dikatakan sedikit. Contoh paling sederhana misalnya, UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan¹³, dan beberapa peraturan dan regulasi lain yang secara tidak spesifik mengatur soal keseimbangan hak buruh tanpa membedakan jenis kelamin.

Maka dengan mengacu pada ragam persoalan yang terkait persoalan gender di Indonesia ini, memicu munculnya spirit perlawanan dan perjuangan dari beberapa kelompok untuk turut mewarnai euforia WM. Jadi ada momen yang tepat dan terdapat kesamaan garis perjuangan serta ideologi maka gerakan WM Indonesia juga muncul sebagai bagian tak terpisahkan dari WM yang ada di berbagai belahan dunia. Dengan perjuangan yang dilakukan, khususnya di Indonesia diharapkan akan muncul milieu dan bahkan kebijakan-kebijakan negara yang pro gender.

¹⁰ Theresia Mutiara Galistya, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perceraian dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 21, No. 1 (2019), hlm. 19-27.

¹¹ Misalnya bisa dibaca pada Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Komisi Nasional Perempuan, tahun 2019 di <https://drive.google.com/file/d/1bTkH4T8YvJ9qmA88Nkeu9-BuWpjiiaTe/view> diakses 20 Januari 2020.

¹² S. Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2006), hlm. 28-41

¹³ Annida Addiniaty, "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Buruh Wanita", dalam https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Buruh%20Perempuan_Nida_REV.pdf. diakses pada 17 Februari 2019

Sebagai sebuah momen yang annually (diperingati setiap tahun) maka WM juga dilaksanakan setiap tahun. Pada tahun 2018 WM kembali digelar. Bahkan setelah dilaksanakan pertama pada tahun 2017, maka pada tahun 2018 WM tidak hanya dipusatkan di satu lokasi saja, tapi juga di beberapa kota di Indonesia. Pada tahun 2018 tersebut setidaknya ada 12 titik yang tersebar di kota-kota besar, misalnya, Bandung, Yogyakarta, Serang, Malang, Surabaya, Sumba, Tondano, Pontianak, Salatiga, Lampung, Denpasar, dan Kupang.¹⁴

Isu penting yang diusung pada tahun 2018 ini bisa dikatakan tidak jauh beda dengan sebelumnya, yaitu isu kekerasan berbasis gender. Lebih-lebih saat itu terdapat isu panas seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)¹⁵. Hanya saja stressing, isu pada masing-masing peristiwa tentu saja memiliki momentumnya masing-masing. Tercatat setidaknya ada 8 tuntutan yang dilayangkan pada aksi pada tahun 2018 yang kesemuanya mengacu pada persamaan perlakuan baik dalam aspek hukum, sosial, ekonomi dan budaya¹⁶.

Pertanyaan penting yang muncul dari fenomena ini adalah, apakah dengan perjuangan yang dinilai banyak kalangan baru “seumur jagung tersebut akan memberi dampak signifikan pada perubahan kebijakan di Indonesia, di tengah banyaknya aktor lain yang juga memperjuangkan hal yang sama? Ataukah ada kekuatan jejaring perjuangan kesetaraan gender yang juga memberikan dampak terhadap keberhasilan perjuangan di tengah munculnya asumsi bahwa aktivisme WM adalah gerakan kolektif yang memusatkan perhatiannya terhadap isu kekerasan, HAM, ketimpangan gender, dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun apa yang menjadi tuntutan di Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan gerakan yang sama di beberapa tempat dan sudah menjadi gerakan transnasional.

METODE PENELITIAN

Dalam proses riset yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan riset ini penulis berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan riset kualitatif. Pada tahap awal penyusunan draf riset yang paling mudah untuk dilakukan penulis adalah melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang mendukung argumentasi yang dibangun tulisan ini.

Hal paling penting yang terkait dengan langkah tersebut adalah menemukan *prior research on topic* yaitu, topik-topik sejenis yang sudah lebih dulu dibahas oleh peneliti sebelumnya. Baru kemudian tulisan ini disusun berdasarkan argumentasi bahwa aspek gerakan WM sebagai transnasional movement belum banyak dibahas (untuk tidak mengatakan tidak ada). Namun sepanjang penelusuran yang dilakukan tema tersebut belum ada yang membahasnya. Aspek paling

¹⁴ <https://voxpath.id/womens-march-2018/>, “Women’s March dalam Jepratan Kamera”, Voxpop Indonesia, diakses tanggal 10 Mei 2018.

¹⁵ Kate Walton, Wawancara via email, 5 Agustus 2019.

¹⁶ Lebih jelasnya mengenai isi tuntutan bisa dibaca di <https://voxpath.id/womens-march-2018/>, “Women’s March....”, diakses pada 10 Mei 2018,

menarik dalam proses awal penelitian ini adalah menemukan irisan tentang bagaimana sebuah gerakan transnasional memiliki pengaruh terhadap kebijakan negara sesuai dengan ideologi gerakan yang diusung.

Setelah melakukan studi awal, maka berdasarkan pada langkah-langkah metode kualitatif, penulis mengidentifikasi data apa yang diperlukan, unit analisis dan subyek yang valid dijadikan sebagai sumber data dan bagaimana langkah-langkah memperoleh data, baik data primer maupun data sekunder. Setidaknya kemudian dirumuskanlah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diturunkan dari rumusan masalah, dan disusun secara semi terstruktur untuk ditanyakan pada beberapa orang aktivis WM yang penulis dapatkan kontakannya dari beragam sumber.

Demikianlah, selanjutnya dilakukanlah analisa kualitatif dengan menggunakan versi Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu melakukan reduksi data, kemudian selanjutnya penyajian data, dan ketiga adalah kesimpulan/verifikasi (*conclusion*).¹⁷ Proses analisa data yang berupa data kualitatif ini dilakukan secara terus menerus. Pada proses ini seringkali dilakukan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹⁸

Secara teoritik penulis dimudahkan oleh alat bantu berupa teori feminisme liberal, teori gerakan sosial dan teori kesetaraan gender. Hal ini digunakan sebagai alat analisis yang disesuaikan dengan masalah yang menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini. Sehingga kesesuaian dan keabsahan hasil penelitian menjadi lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis dikarenakan tulisan ini dibangun atas asumsi-asumsi kualitatif¹⁹.

JEJAK WOMEN'S MARCH DI INDONESIA DAN GARIS PERJUANGANNYA

Sebagai sebuah gerakan yang muncul belakangan sebenarnya WM muncul sebagai sikap rekatif atas eksistensi, sikap dan tindak tanduk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang sangat rasis dan seringkali melecehkan perempuan. Presiden kontroversial Amerika Serikat ke-45 tersebut sebenarnya banyak mendapatkan sorotan lain selain pada persoalan rasisme dan pelecehan seksual. Namun reaksi-reaksi protes dan demonstrasi lainnya tidak seperti gerakan WM yang kemudian berkembang menjadi gerakan bersama kaum perempuan hampir di seluruh belahan dunia. Inilah yang membedakan reaksi lain dengan reaksi mayoritas aktivis kesetaraan gender yang dimulai di Washongton DC ini²⁰.

¹⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terj. (Jakarta: UI Press, 1992) hlm 16.

¹⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2016). 7-8

¹⁹ Sulistyono & Basuki dalam E Fatmawati, "Metode Penelitian", diakses pada 20 Juni 2019, http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB_III.pdf.

²⁰ Nurma Afrinda Prandansari, "Women's March, Gerakan Masif Perempuan Menentang Diskriminasi", di <https://gelorasriwijaya.co/blog/womens-> diakses pada 29 April 2018,

Gelombang protes yang berkembang secara transnasional ini pun hanya dimulai dari ajakan melalui media sosial. Hal ini tentu menarik, dimana gerakan perlawanan yang memiliki kekuatan super dahsyat hanya dimulai dari sebuah ajakan dari media sosial²¹. Bicara aktor yang menjadi inisiatorpun, gerakan ini digawangi oleh empat inisiator perempuan, yaitu Carmen Perez, Tamika D. Mallory, Linda Sarsour, dan pengusaha muda Bob Bland²². Dukunganpun datang dari para pesohor semisal Gloria Steinem, Ashley Judd, Ferrera, Michael Moore, Jessica Chastain, Chloe Graze Moretz, Bella Thorne, Chrissy Teign, Rossie Perez, dan lain-lain.²³

Gelombang demo sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh para perempuan, walaupun isunya adalah isu yang membela hak-hak kaum perempuan. Tidak sedikit kaum pria yang juga terlibat secara aktif dalam gerakan tersebut. Mereka melebur dalam euforia aksi dengan tujuan yang sama menyampaikan pesan kesetaraan berdasarkan gender karena merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM).

Salah seorang Demonstran bernama Renne menyatakan,

“Saya berunjuk rasa demi putri saya dan generasi perempuan mendatang. Mengapa? Saya ingin mereka tahu bahwa mereka tetap memiliki kesempatan yang sama dan bahwa saya berjuang demi mereka. Kami ingin Trump tahu bahwa kami tetap akan berjuang dan tidak akan mundur”²⁴.

Menilik laporan dari Associated Press, mencatat begitu besarnya pengaruh dari aksi ini sehingga mendorong sekitar 275 ribu orang untuk turut meramaikan dan berpartisipasi. Pemberitaan itu bukan dimaksudkan untuk memberikan kosan bombastis, namun berdasarkan pantauan pada berbagai moda transportasi yang saat itu digunakan, baik kereta api maupun bis. Associated Press mencatat ada sekitar 1.800 bis yang digunakan para peserta aksi. Artinya secara matematis lebih dari 100.000 orang datang hanya dengan menggunakan bis, belum lagi kereta api dan moda transportasi lainnya. Hal ini menjadikan gerakan tersebut dinilai sebagai gerakan massa terbesar di Amerika dalam 10 tahun belakangan²⁵.

Efek domino gerakan ini membakar spirit para pejuang dan simpatisan gerakan kesetaraan gender. Dilaporkan bahwa ada 673 aksi sejenis yang di seluruh Amerika. Bahkan menjalar ke

²¹ Bisa dibandingkan dengan bagaimana media sosial memiliki peran paling fundamental dalam revolusi politik, baca Ahmad Rizky Mardhatillah Umar dkk, ”Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena ‘Arab Spring’ dalam Perspektif Ruang Transnasional”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 18 Nomor 2, November 2014, hlm 114-129

²² Anna Christi Suwardi, “Belajar dari Gerakan Women’s March Washington”, Kolom Opini di Geotimes.co.id <https://geotimes.co.id/kolom/sosial/belajar-dari-gerakan-womens-march-washington/> diakses 20 Januari 2020.

²³ Eva Mazrieva, “Protes ‘Women’s March’ di Washington Guncang Dunia”, <https://www.voaindonesia.com/> diakses pada 29 April 2018.

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

negara-negara lainnya dengan menunjukkan simpati seperti terlihat di Benua Eropa, ada Inggris, Republik Ceko, Prancis dan lain-lain. Kemudian di belahan benua yang lain ada Australia, di Asia ada Myanmar, dan tak ketinggalan Indonesia.

Kota pertama yang menjadi sentra gerakan WM pertama kali di Indonesia adalah Jakarta. Pada 4 Maret 2017 gerakan ini ikut serta memberi dukungan bagi perjuangan yang dilakukan secara berbarengan di banyak tempat di dunia. Terdapat sekitar 700 peserta dari berbagai latar belakang organisasi dan komunitas²⁶ misalnya dari Solidaritas Perempuan Indonesia, LBH, Koalisi Perempuan Indonesia, PeaceWomen dan lain-lain. Aksi yang dilakukan oleh banyak elemen gerakan ini diharapkan menimbulkan skala yang lebih luas sehingga pesan yang disampaikan bisa lebih efektif²⁷.

Momen aksi WM Washington dieksploitasi dengan sangat baik oleh kaum feminis di Indonesia dengan turut berperan menggalang dukungan dan melakukan demonstrasi sebagai bentuk indakan solidaritas sesama perempuan di seluruh dunia. Kegiatan itu digunakan sebagai media untuk menyampaikan tuntutan dan mengenalkan pandangan dan sikap bahkan ideologi mereka agar dikenal luas oleh publik. Disamping karena aksi tersebut diselenggarakan dalam rangka Hari Perempuan Internasional, yang diperingati setiap 8 Maret.

Vivi, menegaskan bahwa penyelenggaraan WM Jakarta dimotivasi oleh adanya momentum yang tepat²⁸, ia menyatakan,

“Jadi sebetulnya ini semacam domino effect, kalo kita melihat sejarah WM sendiri, kan dimulainya di Amerika sebagai respon atas terpilihnya Donald Trump. Nah kita waktu itu melihat sepertinya ini bisa jadi momentum dimana kita bisa naikin isu-isu perempuan di Indonesia, sekaligus untuk memberikan rasa solidaritas terhadap teman-teman perempuan di Amerika”.²⁹

Selain karena momentum tersebut, terjadi proses adaptasi gerakan dimana WM Jakarta melakukan adaptasi terhadap apa yang muncul di Amerika. Adaptasi ini sendiri dibarengi dengan modifikasi. Modifikasi dalam konteks ini dilakukan karena terdapat perbedaan latar belakang yang memicu tindakan. Walaupun ideologi yang diperjuangkan sama. Vivi mengatakan, “Kita memang mengambil dari Washington. Tapi kita terapkan sesuai dengan masalah apa yang ada di Indonesia. Waktu yang di Washington DC itu kan karena kebijakan Trump”³⁰.

Jika mencermati bagaimana gerakan ini muncul menjadi gelombang gerakan yang massif. Maka media sosial lagi-lagi menjadi alat agitasi yang cukup efektif. Karena disinyalir bahwa gerakan

²⁶ Ibid

²⁷ Lisa Siregar, “Activists to March in Jakarta to Demand Equal Rights for Women”, <https://jakartaglobe.id>. diakses pada 4 Juli 2019,

²⁸ Anindya Vivi Restuviani, Wawancara pribadi, Jakarta, 24 Juni 2019.

²⁹ Ibid

³⁰ Anindita Putri, Wawancara pribadi, Surabaya, 30 Maret 2019.

WM Jakarta berasal dari inisiasi Jakarta Feminist Discussion Group. Kelompok ini adalah “kelompok maya” yang merupakan grup Facebook. Mereka mengklaim mempunyai 1.300 lebih anggota aktif dengan beragam latar belakang³¹.

Hal tersebut dibenarkan oleh Koordinator Media dan Media Sosial WM Jakarta, Kate Walton, dengan menyebutkan, “WMJ diinisiasi oleh Jakarta Feminist Discussion Group (JFDG) tapi dilaksanakan secara bersama dengan jaringan yang lebih besar. WMJ diinspirasi oleh Women’s March di Amerika Serikat dan seluruh dunia yang diadakan pada bulan January 2017”³².

Dari sumber yang lain juga disebutkan bahwa Naila Rizki Zaqiah, aktivis LBH Masyarakat menyebutkan, “Ketika kami mengadakan pertemuan perdana tahun lalu, tampak jelas bahwa orang-orang dari berbagai latar belakang tertarik pada gerakan ini. Barisan kami termasuk transgender, orang cacat dan pembantu rumah tangga”³³.

Sebagai sebuah gerakan bersama WM jelas melakukan langkah-langkah taktis dan terencana. Setidaknya pengakuan Vivi menjelaskan,

“Untuk melakukan aksi protes, kita awalnya mencari permasalahan apa yang sedang terjadi dan kemudian menentukan langkah apa yang akan kita ambil. Selanjutnya ya ngumpul orang, ngumpul panitia, terus minta izin buat ngeblok jalan. Tapi sebenarnya bukan ngeblok jalan juga, tapi maksudnya izin ke polisi dan lainnya”³⁴.

Dalam melakukan aksi, simbol juga menjadi perhatian yang cukup penting. Selama kegiatan aksi, para aktivis menggunakan simbol pakaian yang sangat khas dimana pilihannya adalah pakaian berwarna ungu dan pink. Menurut Walton, hal itu mempunyai makna simbolik. Ia mengatakan, “Warna pink dan ungu menjadi simbol WMJ 2017 karena kedua warna tersebut sering dianggap sebagai warna feminin, dan kami ingin menunjukkan bahwa feminin tidak berarti lemah lembut”³⁵.

Sedangkan Teta, Wakil Ketua WM Surabaya 2018-2019 menyatakan bahwa aksi di Jakarta tersebut dilakukan guna mengenalkan kepada semua kalangan bahwa, gerakan perempuan itu ada. Teta menyatakan,

“Sasaran utamanya sih yang pertama kita mau memperkenalkan gerakan perempuan ya dan tuntutan-tuntutan perempuan atau tuntutan kaum marginal yang ada di Indonesia ya. Jadi memang tujuannya ke semua masyarakat ya, baik itu ke perempuan, kaum-kaum marginal, juga ke

³¹ Lisa Siregar, “Activists to March in Jakarta to Demand Equal Rights for Women”, <https://jakartaglobe.id/culture/activists-to-march-in-jakarta-to-demand-equal/>, diakses pada 4 Juli 2019

³² Kate Walton, Wawancara melalui email, 5 Agustus 2019

³³ Lisa Siregar, “Activists to March in Jakarta to Demand Equal Rights for Women”, <https://jakartaglobe.id/> diakses pada 4 Juli 2019,

³⁴ Anindya Vivi Restuviani, Wawancara pribadi, Jakarta, 24 Juni 2019.

³⁵ Kate Walton, Wawancara melalui email, 5 Agustus 2019

masyarakat luas. Karena kita kan bersinergi langsung, gak mungkin kita mengedukasi kaum perempuan aja atau teman-teman marginal aja. Sedangkan masyarakat lain gak kita edukasi”³⁶.

Namun demikian muatan tuntutan pada aksi tersebut jelas adalah mengupayakan terwujudnya 8 poin penting yang menjadi tuntutan aksi. Beberapa yang bisa dipaparkan misalnya, soal pengesahan RUU PKS. Hampir semua elemen bangsa Indonesia saat itu memberikan respon soal RUU tersebut. Maka menjadi pertimbangan yang cukup strategis, jika kemudian WM juga menaruh perhatian besar terhadap rancangan legislasi tersebut. Teta membenarkan bahwa RUU tersebut memiliki signifikansi dengan menyatakan,

“Karena ya memang banyak banget kalo Undang-Undang yang sekarang kita lihat, memang ada yang beberapa masih belum pro sama korban. Sama kayak pembinaan langsung terhadap korban kan UU sekarang masih belum mengcover hal itu. Sama kaya perlindungan korban dan keluarga itu kan juga masih belum. Jadi memang perlu banget untuk segera disahkan, karena memang beberapa kasus yang terjadi itu belum dicover sama UU yang ada”³⁷.

Di tengah pro kontra terhadap RUU tersebut, mayoritas pegiat LSM maupun para feminis mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tersebut, mengingat RUU ini dinilai krusial untuk memberi perlindungan pada perempuan dari kekerasan yang seringkali mereka terima. Alasan lain munculnya desakan pengesahan tersebut yaitu fakta tentang tingkat kekerasan yang menimpa perempuan terus meningkat³⁸. Diskriminasi juga menjadi persoalan yang tak bisa diabaikan. Sehingga desakan bagi adanya ketersediaan regulasi dan perundangan menjadi persoalan mendasar yang harus diselesaikan.

Di tengah arus pembelaan terhadap kaum perempuan, perhatian dan dukungan terhadap hak komunitas transgender di Indonesia juga tidak luput dari poin tuntutan. Karena sejatinya mereka juga adalah bagian dari masyarakat yang memerlukan advokasi. Hal ini penting mengingat data dari berbagai lembaga menyebutkan bahwa sejak tahun 2013, ada 89,3% kejadian tindakan kekerasan yang menimpa LGBT.³⁹

Selanjutnya, pada laporan tahunan yang dirilis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan bahwa selama tahun 2013-2015 terdapat sekitar 110 kasus kekerasan dan perlakuan diskriminatif yang diterima oleh kelompok LGBT di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah ujaran kebencian terhadap kelompok ini.⁴⁰

³⁶ Teta Ingkan Gahansyah, Wawancara pribadi, Surabaya, 4 Agustus 2019.

³⁷ Teta Ingkan Gahansyah, Wawancara pribadi, 4 Agustus 2019.

³⁸ Selanjutnya baca dibaca pada Catatan Tahunan...diakses 20 Januari 2020.

³⁹ Tunggal Pawestri, “Menghentikan Kebencian dan Kekerasan Terhadap LGBT”, www.dw.com/id/ diakses pada 8 Agustus 2019,

⁴⁰ Ibid

Isu eksploitasi tubuh juga menjadi bagian penting yang tak luput dari poin perjuangan para aktivis. Pada aksi WM derdapat banyak poster yang menuntut agar tubuh perempuan tidak diatur. Otonomi tubuh dinilai sebagai hak dasar yang perlu diberikan. Menurut Teta, isu otonomi tubuh digaungkan agar masyarakat menyadari bahwa tubuh perempuan bukan persoalan publik. Ia menjelaskan, “Jadi kebanyakan kasus pemerkosaan terhadap perempuan itukan memang yang disalahkan adalah si korban, Karena pake bajunya apasih, jadi kesannya kaya perempuan itu ga bisa bebas berpakaian”.⁴¹

Data menunjukkan bahwa pelecehan atau kekerasan yang menimpa perempuan karena menjadikan tubuh perempuan sebagai objek terus saja meningkat. Kondisi ini dibenarkan Azrina Manalu, Ketua Komnas Perempuan, dengan menyatakan “Jika bicara soal otonomi tubuh, ini sangat dekat dengan situasi kekerasan terhadap perempuan yang semakin hari kita tahu angkanya semakin meningkat terutama di ranah privat yakni dalam keluarga dan relasi personal lainnya”.⁴² Pelecehan seksual masih dinilai sebagai isu yang kurang penting. Padahal pelecehan seksual dan otonomi tubuh merupakan dua hal yang mempunyai keterkaitan erat. Pelecehan seksual adalah tindakan yang sangat berbahaya bagi kondisi psikologis korban.

Aksi WM pada 2017 dinilai sukses. Indikasinya misalnya, banyaknya dukungan dari berbagai kalangan dan yang lebih menggembirakan adalah banyaknya generasi muda yang ikut berpartisipasi. Hal ini disebutkan oleh Kate Walton,

*“Berdasarkan jumlah peserta yang datang atas keinginan sendiri, artinya tidak ada yang dibayar atau diberi nasi box untuk memicu ketertarikannya, serta jumlah organisasi dan komunitas yang ikut terlibat aktif dalam aksinya. Kebanyakan peserta tidak pernah mengikuti aksi sebelumnya dan malah sama sekali tidak terlibat dalam gerakan apapun, maka bisa dikatakan sukses dari aspek peningkatan kesadaran. Liputan media juga cukup besar dan mengangkat beberapa topik dan desakan penting”.*⁴³

Sehingga berdasarkan fakta tersebut WM chapter Jakarta disebut sebagai langkah awal dari sekian banyak kegiatan yang dirancang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Sehingga pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2018 aksi serupa tidak dilaksanakan di satu titik saja, melainkan dilaksanakan juga di dua belas kota lain di Indonesia, yaitu Bandung, Serang, Lampung, Salatiga, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Kupang, Sumba, dan Tondano⁴⁴. Bahkan lembaga yang ikut ambil bagian menjadi semakin luas dan beragam ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), LBH Apik, LBH

⁴¹ Teta Ingkan Gahansyah, Wawancara pribadi, Surabaya, 4 Agustus 2019.

⁴² “Women’s March 2018 Tekankan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan”, UCAN Indonesia, <https://indonesia.ucanews.com/2018/03/06/> diakses pada 8 Agustus 2019,

⁴³ Kate Walton, wawancara via email, 5 Agustus 2019.

⁴⁴ “Women’s March Dalam Jepratan Kamera”, Voxpop Indonesia, <https://voxpop.id/womens-march-> diakses pada 10 Mei 2018,

Masyarakat dan Jaringan Nasional untuk Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) dan lain sebagainya.⁴⁵

Kerri Na Basaria, ketua penyelenggaraan WM Jakarta 2018 menyatakan, “WM J tahun lalu adalah pengingat bahwa demonstrasi seperti ini diperlukan selama ketidakadilan terus ada, terutama terhadap perempuan, kelompok minoritas dan marginal. Itulah sebabnya kami membahas masalah kekerasan berbasis gender pada tahun 2018”.⁴⁶

Tuntutan yang menjadi isu aksi, pada tahun 2018 ini lebih fokus pada isu berbasis gender misalnya kekerasan dan diskriminasi, kemudian perlindungan terhadap asisten rumah tangga dan buruh migran, pernikahan usia anak, perlindungan bagi pekerja seks, tindak kekerasan dalam pacaran, serta isu krusial lainnya. RUU PKS yang saat itu belum disahkan juga menjadi isu yang digaugkan kembali. Ditambah lagi dengan adanya RUU Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT)⁴⁷.

Penilaian akan suksesnya WM di Indonesia pada 2017-2018 tidak bisa dilepaskan dari peranan aktor yang memiliki andil luar biasa bagi terselenggaranya aksi sebagai bentuk eksistensi gerakan. Orang-orang seperti, Anindya Vivi Restuviani,⁴⁸ Kate Walton⁴⁹ Kerri Na Basaria⁵⁰ Naila Rizqi Zakiah,⁵¹ dan Emily Lawsen⁵² tidak bisa disepelekan. Karenanya motor penggerak dalam atau aktor yang menjadi figur sangat penting dalam sebuah gerakan sosial.

AKTOR, AKTIVISME DAN PENGARUHNYA DALAM KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER; REALITA DAN KLAIM

⁴⁵ Dhania Sarahtika, “The Women Behind Women’s March Jakarta”, <https://jakartaglobe.id/culture/women-behind-womens-march-jakarta/>. diakses pada 28 Mei 2019,

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ “Women’s March Dalam Jepretan Kamera”, Voxpop Indonesia, diakses pada 10 Mei 2018, <https://voxpath.id/womens-march-2018/>.

⁴⁸ Anindya Vivi Restuviani adalah alumni program studi Hukum di Universitas Diponegoro. Pada tahun 2017 menjabat sebagai ketua penyelenggara dari FemFest 2017, sedangkan di tahun 2018 Ia bertanggung jawab sebagai koordinator kemitraan pada Women’s March Jakarta 2018.

⁴⁹ Kate Walton, seorang penulis lepas dan bekerja untuk sejumlah program- program pembangunan seputar gender, kesehatan, dan tata kelola perempuan. Ia bertanggung jawab sebagai koordinator media di Women’s March Jakarta dan FemFest,

⁵⁰ Kerri Na Basaria merupakan alumni Sejarah di University of Sydney dan University of St. Andrews. Terlibat sebagai aktivis seputar hak-hak perempuan ketika menjadi sukarelawan pada Women’s March Jakarta tahun 2017, Sedangkan pada tahun 2018, bertanggungjawab sebagai ketua penyelenggara.

⁵¹ Naila Rizqi Zakiah merupakan wakil penyelenggara Women’s March Jakarta 2018. Naila bertugas melobi anggota DPR-RI untuk meninjau kembali rancangan revisi KUHP

⁵² Emily Lawsen merupakan koordinator acara untuk Women’s March Jakarta.

Seperti disebutkan di atas bahwa aktor sebagai titik sentral gerakan jelas memiliki andil yang cukup besar dalam tumbuh dan berkembangnya gerakan. Termasuk di dalamnya adalah pengaruh yang diberikan ke pihak lain. Sebagai kelompok penekan (*pressure group*), maka gerakan WM yang mengusung misi kesetaraan gender memiliki target-target sasaran yang cukup jelas dan terencana.

Dalam konteks Indonesia, perlunya regulasi soal aturan hukum yang jelas mengenai status, perlindungan dan keamanan kaum marginal dan minoritas adalah penyokong bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkeadilan gender. Maka itu pulalah yang terus didorong untuk diwujudkan. Gerakan yang dilakukan dalam dua tahun periodik (2017-2018) membuktikan bahwa fokus tuntutan yang cukup penting adalah pengesahan regulasi, walaupun faktanya kemudian sampai tulisan ini ditulis masih belum jelas *juntrungan*-nya.

Dalam melakukan desakan kepada pemerintah, para aktivis melakukannya dengan beragam cara. Cara paling umum yang dikenal di dunia pergerakan adalah demonstrasi. Dengan aksi demo WM Indonesia, poin penting yang menjadi isu utama adalah isu-isu kekerasan, isu berlatarbelakang gender, dan isu HAM. Ketiganya dianggap sebagai isu paling krusial dalam relasi gender di Indonesia. Di bagian awal penulis sudah menyebutkan bagaimana WM mengusung deapan tuntutan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka yang paling utama adalah bagaimana agar tuntutan diperhatikan. Semakin besar massa yang menuntut maka kemungkinan besar tuntutan dterpeuhi juga semakin besar. Hal itulah disadari oleh para aktivis WM sehingga untuk mendapatkan perhatian, sebisa mungkin peserta demo harus melibatkan orang banyak. Oleh karenanya jelas pelibatan massa aksi yang besar pada tahun 2017 sangat berarti bagi langkah-langkah selanjutnya. Diketahui saat itu tidak kurang lebih 700 peserta yang berasal dari gabungan komunitas yang konsen pada isu gender dan HAM ikut ambil bagian. Agar terlihat sebagai aksi yang solid maka strategi *march* (parade) adalah sesuatu yang sangat rasional untuk dilakukan, di samping memang nama dari gerakan tersebut adalah *women march*. Hal tersebut sebagai bagian dari kesengajaan dan strategi untuk memberi makna bahwa isu yang diusung bukanlah isu “murahan” namun benar-benar fakta yang terjadi terjadi di tengah masyarakat.⁵³

Poin lain yang menjadi tuntutan para aktivis tersebut misalnya menuntut agar “Pemerintah dan masyarakat melindungi pekerja perempuan”. Kasus kekerasan yang menimpa pekerja dan buruh wanita terus saja terjadi. Ironisnya kondisi ini diperparah dengan jeratan sindikat perdagangan manusia (*human trafficking*)⁵⁴. Maka melalui gerakan dan pemahaman para aktor akan isu tersebut, momen WM dimanfaatkan oleh para menyuarakan masalah tersebut, sekaligus mendesak pemerintah Indonesia untuk sesegera mungkin membuat kebijakan yang melindungi

⁵³ Anindya Vivi Restuviani , Wawancara pribadi, Jakarta, 24 Juni 2019.

⁵⁴ Nurma Afrinda Prandansari, “Women’s March, Gerakan Masif Perempuan Menentang Diskriminasi”,<https://gelorasriwijaya.co/> diakses pada 29 April 2018.

pekerja dan buruh buruh wanita berbasis HAM. Atau minimal ada upaya untuk mendorong pemerintah untuk mengesahkan RUU terkait yang mengatur masalah tersebut.

Melihat upaya yang dilakukan WM juga ikut ambil bagian dalam memberikan desakan bagi pemerintah untuk mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri⁵⁵, selain itu pegiat WM juga turut memberi dukungan bagi Organisasi Pekerja Migran dalam hal advokasi.⁵⁶ Dan memang kemudian faktanya, pada 25 Oktober 2017 UU tentang Perlindungan Pekerja Migran akhirnya disahkan menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia⁵⁷.

Melihat fakta tersebut tentu saja peran aktor dan gerakan WM tidak bisa dafikan begitu saja. Walaupun demikian perlu dicermati bahwa proses pengundangan UU No. 18 Tahun 2017 itu terjadi juga bukan semata-mata karena peran penting Gerakan atau intervensi aktor WM. Karena diketahui bahwa RUU tersebut juga sebenarnya sudah melalui proses yang cukup panjang, bahkan sampai 7 tahun, jauh sebelum WM muncul menjadi sebuah gerakan.

Kemudian, selain melakukan desakan kepada pemerintah melalui aksi demonstrasi, pegiat kesetaraan gender tersebut juga merambah ke aksi-aksi yang lebih spesifik semisal advokasi. Dalam konteks regulasi, misalnya tentang Rancangan KUHP yang dipandanga akan melakukan “kriminalisasi” terhadap perempuan, LGBTIQ dan mereka yang berprofesi sebagai pekerja kesehatan reproduksi seksual. Para aktor gerakan menolak Rancangan KUHP tersebut dan bahkan membuat petisi dengan mengajak masyarakat menolaknya. Setelah petisi yang dibuat dianggap memenuhi target, kemudian penolakan tersebut dibawa ke DPR, sampai pada akhirnya pengesahan rancangan KUHP tersebut pun ditunda.⁵⁸

Pada paruh kedua dari keberadaan WM di Indonesia, 8 tuntutan juga masih menjadi poin yang diusung dengan lebih melebarkan sayap dan makna kesetaraan dan penghapusan diskriminasi. Poin yang bisa dicatat misalnya,

“(1) Penghapusan hukum dan kebijakan yang diskriminatif dan melanggengkan kekerasan berbasis gender; (2) Pengesahan hukum yang melindungi perempuan, anak, masyarakat adat, kelompok difabel, kelompok minoritas gender dan seksual dari kekerasan berbasis gender; (3) Penyediaan akses keadilan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender; (4) Penghentian intervensi negara dan masyarakat terhadap tubuh dan seksualitas warga negara; (5) penghapusan stigma dan

⁵⁵ Sekretariat Migrant care, “Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja migran Indonesia”, <http://www.migrantcare.net/2017/> diakses pada 9 Juli 2019.

⁵⁶ Kate Walton, wawancara via e-mail, 5 Agustus 2019.

⁵⁷ Sekretariat Migrant care, “Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja migran Indonesia”, diakses pada 9 Juli 2019, <http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>.

⁵⁸ Anindya Vivi Restuviani, Wawancara pribadi Jakarta, 24 Juni 2019.

*diskriminasi berbasis gender, seksualitas dan status kesehatan; (6) Penghapusan praktik dan budaya kekerasan berbasis gender di lingkungan hidup, pendidikan dan pekerjaan; (7) Penyelesaian akar kekerasan yaitu pemiskinan perempuan, khususnya perempuan buruh industri, konflik SDA, transpuan, pekerja migran, pekerja seks dan pekerja domestic; (8) Penghapusan praktik dan budaya kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan, lingkungan hukum, lingkungan hidup dan pekerjaan.*⁵⁹

Ringkasnya 8 poin tersebut difokuskan pada isu seputar kekerasan berbasis gender. Dengan kembali memberi desakan soal aturan-aturan dan kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender⁶⁰.

Selain melakukan aksi di jalanan, gerakan WM tahap kedua inimerambah ke sosial media. Para aktivis mulai memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Para aktivis gerakan saling membagikan konten tuntutan mereka baik yang dibuat berupa teks atau gambar. Langkah ini dinilai cukup efektif karena berbagai kalangan masyarakat yang tidak mengikuti aksi secara langsung juga bisa ikut serta meramaikan postingan. Isu-isu yang diperjuangkan dengan sangat cepat diketahui oleh masyarakat, dan bahkan secara langsung direspon.

Hal ini memberi keuntungan bagi para aktor dan misi gerakan, karena masyarakat menjadi semakin aware dan banyak yang ikut memberikan desakan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan yang sesuai misi aksi.

Selebihnya, secara personal para aktivis juga secara gradual menyelenggarakan kegiatan seperti talk show, bedah film, diskusi, program edukasi dan lain sebagainya. Sementara dalam konteks daerah, para aktivis sering memberikan dukungan dan melakukan konsolidasi internal dengan LSM di daerah guna menyampaikan tuntutan mereka ke pihak-pihak terkait di daerah (*stakeholders* daerah).⁶¹

Akhirnya penulis meyakini bahwa Gerakan WM pada dasarnya mengusung konsep Feminisme Liberal, sehingga pandangannya lebih mengarah pada upaya-upaya total bagaimana supaya perempuan mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan sosial. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan media aksi gerakan dengan tujuan untuk mengupah pola pikir masyarakat, khususnya pola pikir dan persepsi serta perlakuan terhadap perempuan dan kelompok marginal lainnya.

⁵⁹ “Women’s March Dalam Jepratan Kamera”, <https://voxpath.id/womens-march-2018/>, diakses pada 10 Mei 2018,

⁶⁰ Misalnya desakan untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan mengkritik rancangan KUHP tentang perluasan soal zina dan larangan distribusi alat kontrasepsi atau pendidikan kesehatan reproduksi.

⁶¹ Teta Ingkan Gahansyah, Wawancara pribadi, Surabaya, 30 Maret 2019.

Dalam melakukan aksinya, aktivis-aktivis gerakan (WM) mengusung beragam tuntutan kepada pemerintah dan masyarakat dengan maksud meng-create kondisi yang menguntungkan bagi kebijakan gender dan terutama lahirnya kebijakan yang mendukung prinsip kesetaraan gender. Sehingga harapan munculnya kondisi dan lingkungan dimana laki-laki ataupun perempuan memperoleh perlakuan yang sama dapat terwujud, sehingga kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan pada akhirnya tidak lagi sekedar angan-angan.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas beberapa poin yang menjadi keimpulan adalah WM sebagai gerakan transnasional setidaknya telah melakukan upaya-upaya untuk memberikan intervensi dan pengaruh terhadap lahirnya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di Indonesia selama periode 2017-2018. Efek domino gerakan yang bermula di Washington DC ini memberi ruang ekspresi bagi aktor dan aktivisme gerakan gender di Indonesia.

Di Indonesia, WM berfungsi sebagai kelompok penekan sekaligus menjadi *supporting system* LSM-LSM dan komunitas lain dalam mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari adanya fakta bahwa pada akhirnya desakan yang terus dilakukan oleh aktivis akhirnya membuahkan hasil dengan adanya pengesahan beberapa regulasi yang menjadi pokok tuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Dina. Martiany. (2018) "International Women's Day dan Gerakan Bersama Melawan Kekerasan Seksual". jurnal ilmiah. vol. x, no. 05/Puslit/Maret/2018.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Terj. Jakarta: UI Press.
- Ni Komang Arie Suwastini. "Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 2 No.1. 2017
- S. Irianto (ed), (2006) Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor.
- Sugiyono. (2016) "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (Bandung: Alfabeta.

Suharko. (2006)“Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10, No. 1. Juli 2006.

Theresia Mutiara Galistya, “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perceraian dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 21, No. 1 (2019)

Wewen Kusumi Rahayu, (2016). “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)”. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. Volume 2, no. 1.*

Wawancara

Teta Ingkan Gahansyah, dkk. Wawancara pribadi dengan penulis. Surabaya, 30 Maret 2019.

Restuviani, Anindya Vivi. Koordinator Kemitraan Women’s March Jakarta 2018.

Wawancara pribadi dengan penulis. Jakarta, 24 Juni 2019.

Walton, Kate. Koordinator Media dan Media Sosial Women’s March Jakarta 2017.

Wawancara via email dengan penulis. Surabaya, 5 Agustus 2019.

Internet

Addiniaty, Annida. “Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Buruh Wanita”. diakses pada 17 Februari 2019. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Buruh%20Perempuan_Nida_REV.pdf.

Mazrieva, Eva. “Protes ‘Women’s March’ di Washington Guncang Dunia”. diakses pada 29 April 2018. <https://www.voaindonesia.com/a/protes-womens-march-washington-guncang-dunia/3686721.html>.

Prandansari, Nurma Afrinda. “Women’s March, Gerakan Masif Perempuan Menentang Diskriminasi”. diakses pada 29 April 2018. <https://gelorasriwijaya.co/blog/womens-march-gerakan-masif-perempuan-menentang-diskriminasi/#>.

Prihandhini. “Tuntutan Perempuan Indonesia Di Women’s March Jakarta 2017”. diakses pada 8 Agustus 2019. <https://womantalk.com/news-update/articles/tuntutan-perempuan-indonesia-di-womens-march-jakarta-2017-D40NO>.

- Pawestri, Tunggal. “Menghentikan Kebencian dan Kekerasan Terhadap LGBT”. diakses pada 8 Agustus 2019. <https://www.dw.com/id/menghentikan-kebencian-dan-kekerasan-terhadap-lgbt/a-19515331-0>.
- Suardi, Anna Christi. “Belajar Dari Gerakan Women’s March Washington”. diakses pada 14 Mei 2018. <https://geotimes.co.id/kolom/sosial/belajar-dari-gerakan-womens-march-washington/>.
- Siregar, Lisa. “Activists to March in Jakarta to Demand Equal Rights for Women”. diakses pada 4 Juli 2019. <https://jakartaglobe.id/culture/activists-to-march-in-jakarta-to-demand-equal-rights-for-women/>.
- Sarhtika, Dhania. “The Women Behind Women’s March Jakarta”. diakses pada 28 Mei 2019. <https://jakartaglobe.id/culture/women-behind-womens-march-jakarta/>.
- Sekretariat Migrant care. “Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja migran Indonesia”. diakses pada 9 Juli 2019. <http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>.
- UCAN Indonesia. “Women’s March 2018 Tekankan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan”. diakses pada 8 Agustus 2019. <https://indonesia.ucanews.com/2018/03/06/womens-march-2018-tekankan-perlindungan-hukum-bagi-perempuan/>. Voxpop Indonesia. “Women’s March Dalam Jepletan Kamera”. diakses pada 10 Mei 2018. <https://voxpath.id/womens-march-2018/>.